

## **PENGARUH KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF**

**Anita Wijayanti**

Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina

\*E-mail: [anita.wijayanti@paramadina.ac.id](mailto:anita.wijayanti@paramadina.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The implementation of Indonesia's foreign policy in the form of "Free and Active Politics" in its development since the founding of the Indonesian state was influenced not only by the domestic situation but also by the growth of the international political climate that occurred at that time. The rapidly changing international political climate must be followed and analyzed continuously for the sake of national interest. Furthermore, the steps to respond to these changes must be decided in the implementation of foreign policy to achieve the national interest. The use of the concept of national interest here is to explain the noble ideals that Indonesia wants to achieve with a free and active foreign policy. This paper aims to highlight the dynamics of the meaning of "free and active" in Indonesia's foreign policy in terms of domestic conditions at that time and how Indonesia's foreign policy was able to respond to international political challenges that have occurred since the early days of independence until now, which are none other than policies. It was made in the national interest in order to maintain the state of Indonesia as an independent and sovereign state in the midst of a turbulent world.*

**Keywords:** *foreign policy, Free and Active Politics, National Government*

### **ABSTRAK**

Pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam wujud “Politik Bebas Aktif” dalam perkembangannya sejak berdirinya negara Indonesia dipengaruhi oleh tidak hanya situasi domestik tetapi juga oleh pertumbuhan iklim politik internasional yang terjadi pada masa itu. Perubahan yang cepat iklim politik internasional harus diikuti dan dianalisis terus menerus demi kepentingan nasional. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menanggapi perubahan tersebut harus diputuskan di dalam implementasi politik luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional. Penggunaan konsep kepentingan nasional disini untuk menjelaskan cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif. Tulisan ini hendak menyoroti dinamika pemaknaan “bebas aktif” dalam politik luar negeri Indonesia dilihat dari kondisi domestik pada saat itu serta bagaimana politik luar negeri Indonesia mampu menjawab tantangan politik Internasional yang terjadi dari sejak masa awal kemerdekaan sampai saat ini, yang tidak lain kebijakan-kebijakan tersebut dibuat demi kepentingan nasional dalam rangka mempertahankan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah dunia yang bergejolak.

**Kata Kunci:** Politik luar negeri, Politik Bebas Aktif, Pemerintahan nasional

## PENDAHULUAN

Politik luar negeri Indonesia berarti setiap kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menjalankan hubungan dengan dunia internasional demi mencapai tujuan nasional (Mila et al., 2020). Sejarah dan perkembangan politik luar negeri di Indonesia mengalami perubahan yaitu dimulai sejak awal kemerdekaan, pada masa pemerintah Soekarno dan Moh Hatta, hingga pada masa sekarang yakni pemerintahan Jokowi. Perubahan politik luar negeri Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi negara, kepemimpinan pada masa tersebut dan dinamika situasi internasional (Delanova, 2018). Pemerintah selalu berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang harus disesuaikan dengan situasi di dalam maupun di luar negeri dengan selalu berpegang pada prinsip bebas-aktif tanpa meninggalkan aspirasi masyarakat (Keohane, 2020; Moravcsik, 1997). Dengan begitu, pemerintah telah memperjuangkan berbagai kepentingan nasional terhadap dunia Internasional dengan maksud mencapai tujuan nasional.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif didasarkan pada landasan konstitusional, yakni tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan pasal 11 UUD 1945. Dengan tercantumnya bentuk politik ini di UUD kita dapat melihat bagaimana pentingnya bentuk politik ini bagi kelangsungan politik luar negeri Indonesia. Sebagai salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia bahkan pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 serta membentuk Gerakan Non Blok bersama beberapa negara Asia Afrika lainnya. Prinsip bebas aktif adalah Sumber dari politik luar negeri yang dijalankan pemerintah Indonesia. Para pemimpin Indonesia telah mengimplementasikan prinsip ini disesuaikan dengan situasi sistem internasional yang ada (Haryanto, 2014). Seiring dengan perubahan kepemimpinan, politik di Indonesia juga mengalami pergeseran identitas yang pada akhirnya, perubahan politik dalam negeri berujung pada runtuhnya Orde Baru. Pergantian pemimpin Negara selama beberapa kali diiringi dengan

dinamika pada kontestasi politik yang memunculkan presiden dengan orientasi politik luar negeri yang berbeda-beda (Ganjar Widhiyoga; Setyasih Harini, 2019).

Beberapa riset telah menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia merupakan salah satu sumber kebijakan luar negeri yang dianut Indonesia sejak memproklamkan kemerdekaan. Haryanto (2014) menemukan bahwa Prinsip bebas aktif diterapkan oleh pemerintah Indonesia dari Era Soekarno hingga Susilo Bambang Yudoyono (SBY) secara dinamis mempertimbangkan role prescriptions atau harapan peran dari negara lain. Sementara itu Ganjar Widhiyoga dan Setyasih Harini (2019) menjelaskan bahwa Prinsip dasar kebijakan politik luar negeri identitas politik luar negeri Indonesia pasca reformasi memiliki identitas khas yang dipengaruhi rezim pemimpinnya, Pada rezim Presiden Abdurrahman Wahid, identitas politik luar negeri cenderung mengarah pada prinsip rasionalitas, dengan meletakkan presiden sebagai aktor dominan. Pada rezim Presiden Megawati Soekarnoputri, identitas politik luar negeri Indonesia mengarah pada pembenahan pemerintahan melalui proses demokratisasi. Pada rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, identitas politik luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah mengandalkan pada diplomasi soft power yang cenderung menggambarkan lemahnya kedaulatan dan ketegasan Indonesia. Kemudian politik luar negeri di era kepemimpinan Jokowi, Secara konseptual dan normatif visi-misi kebijakan luar negeri tetap sejalan dengan prinsip bebas-aktif dan tujuan konstitusional politik luar negeri Indonesia. Namun demikian, tetap terdapat ketidak sesuaian antara visi-misi dengan prioritas program untuk beberapa bidang (Mangadar, 2015).

Berbagai penelitian tentang politik bebas aktif Indonesia telah banyak menjelaskan perkembangan dari zaman Soekarno sampai dengan Saat ini, namun tulisan ini mengulas spesifik pada perkembangan pemaknaan politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia dari masa ke masa sejak berdirinya negara ini dikaitkan dengan latar belakang atas penerapan politik luar negeri tersebut dalam rangka mencapai tujuan kepentingan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian dengan menggunakan kajian pustaka tentu saja bukan hanya sekedar membaca dan mencatat literatur. Namun data pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur mulai dari buku, jurnal, maupun internet diolah sehingga menjadi karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pembaca. Peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan baik sebelum maupun selama melakukan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengkaji setiap perkembangan politik luar negeri Indonesia mulai sejak awal kemerdekaan sampai pada masa pemerintahan yang sekarang berjalan dengan mengumpulkan, membaca, membandingkan, serta mengolah literatur yang tersedia, mulai dari buku-buku hingga artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Luar Negeri (*foreign policy*)**

Menurut Henry Kissinger yang merupakan akademisi dan praktisi kebijakan luar negeri AS, "kebijakan luar negeri dimulai ketika kebijakan dalam negeri berakhir". Dari sini dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri merupakan hasil politik dalam negeri yang kemudian dikedepankan dalam perundingan isu-isu politik internasional. Dengan kata lain, politik luar negeri dibuat sesuai dengan kondisi politik internasional saat itu dan politik luar negeri menjadi eksistensi yang penting bagi masing-masing negara. Menjaga keamanan negaranya dan mengumpulkan kekuatan ketika negara lain telah menerima kebijakan luar negeri yang dibuat oleh negara tersebut. Perlu juga digarisbawahi bahwa politik luar negeri juga mempengaruhi politik dalam negeri dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Politik luar negeri dan diplomasi pada dasarnya berjalan seiring dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kepentingan bagi negaranya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antar negara dan termasuk interaksi dalam hubungan internasional.

Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi (yang disusun oleh Khasan Ashari) menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri (*foreign policy*) adalah

serangkaian kebijakan di bidang politik dan keamanan yang ditetapkan dan dijalankan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain maupun aktor non-negara. Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) mencakup proses perencanaan, implementasi, serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam studi hubungan internasional dikenal beberapa model penyusunan kebijakan luar negeri. *Rational model* melihat negara sebagai sebuah kesatuan yang mampu mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, menetapkan beberapa alternatif pemecahan masalah, menetapkan alternatif terbaik, dan bertindak sesuai alternatif yang dipilih. *Bureaucratic model* yang melihat kebijakan luar negeri sebagai hasil kompromi individu dan organisasi di dalam sistem birokrasi negara. Sementara *pluralist model* melihat kebijakan luar negeri sebagai kebijakan yang dibentuk berdasarkan masukan dari kelompok kepentingan, kelompok usaha, opini publik, dan tekanan masyarakat. Kelompok realist umumnya melihat penyusunan kebijakan luar negeri dari perspektif rational model menjadi tekanan atau ancaman dari luar sebagai elemen utama yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Sebaliknya kelompok liberal melihat penyusunan kebijakan luar negeri dari perspektif *bureaucratic* dan *pluralist model* serta menjadikan kepentingan domestik sebagai elemen utama yang dijadikan dasar pengambilan keputusan.

### **Keterkaitan Politik Dalam Negeri (Politik Domestik) dengan Politik Luar Negeri**

Pengertian politik dalam negeri dimaknai oleh Fearon (1998) sebagai analisis yang menjelaskan bagaimana interaksi politik dalam negeri mendorong negara untuk mengambil kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, interaksi politik dalam negeri ini juga pada akhirnya mempengaruhi hasil akhir dari kebijakan luar negeri suatu negara. Meskipun politik dalam negeri bukan satu-satunya sumber politik luar negeri yang dipilih oleh suatu negara, menurut Rosenau (1987) perannya cukup signifikan dan dalam beberapa hal dapat dikatakan cukup dominan. Dari uraian di atas, terlihat bahwa asumsi utama politik dalam negeri adalah dinamika dan keadaan dalam negeri.

Politik dalam negeri dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini terlihat dari fakta yang menunjukkan bahwa politik luar negeri

yang diambil oleh pemerintah dalam negeri, tidak lepas dari sistem kekuasaan politik atau partai politik, yang dapat dilihat melalui bentuk koalisi dan oposisi yang terjadi dalam pemerintahan. Penjelasan ini diperkuat dengan pernyataan Fearon (1998) yang mengatakan bahwa negara bukanlah aktor kesatuan, yang berarti dalam menjalankan pemerintahan negara tidak bekerja sendiri, tetapi terdiri dari aktor-aktor perwakilan yang saling berinteraksi dan kemudian menciptakan politik dalam negeri. dinamika. Dalam mencapai kepentingan nasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri, negara harus mampu mengakomodir politik dalam dan luar negeri.

Untuk mengetahui keterkaitan antara politik dalam negeri dan politik internasional, harus diketahui terlebih dahulu bahwa politik dalam negeri dipengaruhi oleh berbagai aktor, baik dari lembaga elit seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik dan oposisi dan koalisinya atau bahkan media. organisasi masyarakat, bisnis koalisi, hingga kelompok teroris (Hudson, 2014).

Kondisi masyarakat domestik turut mempengaruhi kondisi politik dalam negeri. Hal ini karena tujuan utama politik luar negeri adalah untuk memenuhi kepentingan negara yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di tingkat dalam negeri. Tidak hanya itu, aktor internasional juga dapat mempengaruhi politik dalam negeri, baik dari sikap negara lain, MNC, IGO, NCO dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa politik dalam negeri dan politik internasional bersifat timbal balik dan saling berpengaruh, yang dalam perumusan politik luar negeri Putnam (1998 dalam Hudson, 2014) memandang hal ini sebagai permainan dua tingkat yang mewakili keduanya. Dengan demikian, hal ini juga memperkuat asumsi politik dalam negeri yang menjelaskan keterkaitan antara politik dalam negeri dan politik luar negeri.

### **Kepentingan Nasional (National Interest)**

Kepentingan nasional (national interest) merupakan konsep yang digunakan secara luas dalam hubungan internasional dan sering diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh negara di bidang militer, ekonomi, maupun budaya. Tujuan tersebut menjadi acuan negara dalam berinteraksi dengan aktor

lain dalam hubungan internasional. *National interest* atau kepentingan nasional dapat dilihat dari tiga perspektif yaitu (a) sebagai piranti analisis untuk mengkaji preferensi politik luar negeri suatu negara; (b) sebagai kriteria untuk mengevaluasi kebijakan atau tindakan tertentu; dan (c) sebagai justifikasi terhadap kebijakan luar negeri. Teori realism melihat kepentingan nasional sebagai salah satu elemen terpenting dalam hubungan internasional. Realism melihat kelangsungan hidup (*survival*) sebagai tujuan terpenting yang harus diperjuangkan oleh negara dan tujuan lain seperti kemakmuran ekonomi, harus dijadikan sebagai pendukung untuk mempertahankan kelangsungan hidup tersebut. Meskipun demikian terdapat juga anggapan bahwa kepentingan nasional tidak tepat dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu (a) konsep kepentingan nasional bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh situasi pada saat keputusan diambil; (b) kepentingan nasional pada hakikatnya tidak mencerminkan kepentingan bersama (*common interest*); (c) kepentingan nasional disusun secara sepihak sehingga memperbesar peluang terjadinya konflik; (d) kepentingan nasional sering diimplementasikan dengan standar ganda atau *double standard*; dan (e) kepentingan nasional sering dimaksudkan untuk tujuan jangka pendek. Faktor-faktor tersebut memunculkan gagasan untuk mengganti konsep kepentingan nasional seperti konsep kepentingan global (*global interest*) atau kepentingan individu (*individual interest*)

### **Pemaknaan Politik Bebas Aktif Pemerintahan Indonesia**

Berbicara tentang munculnya istilah politik luar negeri Indonesia bebas aktif tidak dapat dilepaskan pada sejarah lahirnya negara Indonesia pada tahun 1945. Perang Dunia II tidak saja menciptakan bipolaritas dalam hubungan internasional, tetapi juga membawa perubahan mendasar dalam proses dekolonisasi. Sebagai akibatnya, semangat kebangsaan meledak dalam bentuk perjuangan kemerdekaan terhadap penjajahan. Wilayah jajahan Belanda, Hindia Timur, yang diduduki Jepang selama Perang Pasifik pun tidak terkecualikan. Dua hari sesudah Jepang menyerah, pada tanggal 17 Agustus 1945, jajahan Belanda itu (yakni Indonesia) menyatakan kemerdekaannya ke seluruh dunia.

Dengan proklamasi tersebut muncullah Indonesia sebagai negara merdeka di peta dunia, dan sesuai dengan tuntutan, ditetapkanlah pembukaan UUD 1945 yang disahkan sehari kemudian, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Dimana didalamnya terdapat landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia khususnya pada alinea pertama dan alinea keempat. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi :

*“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.*

Sedangkan alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah :

*“... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ...”*

Dari situlah lahir politik luar negeri pemerintah RI yang dikenal dengan nama politik bebas aktif. Namun demikian pemaknaan “Politik Bebas Aktif” sendiri mengalami perkembangan sesuai kondisi dalam negeri Indonesia sepanjang sejarah sejak berdirinya negara Indonesia sampai saat ini yang didasari juga dengan lingkungan internasional (*international environment*) dengan konstelasi politik globalnya. Melalui tulisan ini berikut disampaikan tabel pemaknaan “Politik Bebas Aktif” dari masa ke masa termasuk juga *background* sejarah yang melatari pemaknaan tersebut yang dirangkum dari berbagai sumber.

Tabel 1. Pemaknaan “Politik Bebas Aktif” Dari Masa Ke Masa

| <b>Periode</b> | <b>Makna “Bebas”</b>                | <b>Makna “Aktif”</b>  | <b>Background Sejarah yang melatarinya</b>   |
|----------------|-------------------------------------|---|--|
| 1945 – 1947    | Bebas dari segala bentuk penjajahan | Aktif untuk terlibat dalam upaya membasmi penjajahan dari muka bumi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai sebuah negara yang baru lahir, politik luar negeri secara umum masih dimaknai secara harafiah dari Pembukaan UUD 1945.</li> <li>• Fokus perhatian Indonesia pada masa ini yaitu pada konsolidasi politik domestik yang harus menghadapi agresi</li> </ul> |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | militer sekutu dan Belanda dari tahun 1945 hingga 1949.  |
| 1947 – 1948                                  | Tidak memihak pada blok kapitalis dan blok komunis  | Aktif untuk terlibat dalam upaya membasmi penjajahan dari muka bumi      | Makna bebas disini menunjukkan kesadaran akan adanya aktor lain (yaitu Uni Soviet) yang telah bangkit menjadi polar baru yang menyaingi kelompok kapitalis (yang dianggap sebagai sumber kolonialisme dan imperialism), yang memunculkan politik bipolar dalam konstelasi global   |
| 1948 – 1950                                  | Bebas berdaulat (untuk menentukan sikap sendiri) dan menjadi subjek (bukan objek) dari persaingan politik internasional | Aktif untuk terlibat dalam upaya membasmi penjajahan dari muka bumi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaknaan politik luar negeri Indonesia disampaikan secara komprehensif oleh Hatta pada pidatonya yang berjudul “Mendayung antara dua karang” di depan Badan Pekerja KNIP pada 2 September 1948 sebagai respon munculnya rivalitas dari 2 blok adidaya yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet.</li> <li>• Hatta kemudian secara harafiah menyebutkan politik luar negeri Indonesia dengan “Politik Bebas Aktif” pada artikel <i>Foreign Affairs</i> di tahun 1953.</li> </ul> |
| 1950 – 1953<br>(Era PM Natsir ; PM Soekiman) | Tidak memihak pada kubu manapun (AS ataupun Uni Soviet)   | Aktif mengupayakan terwujudnya perdamaian dan meredakan ketegangan dunia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dengan penekanan pada “tidak memihak pada kubu manapun” disampaikan oleh Kabinet Natsir pada September 1950 di depan Parlemen.</li> <li>• Kabinet Natsir yang bubar pada April</li> </ul>  |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | <p>1950 dilanjutkan oleh Kabinet Soekiman yang menyebutkan bahwa Jakarta harus menghindari diri dari ikatan terhadap salah satu blok Perang Dingin, namun bukan Indonesia bersikap netral. Indonesia tidak boleh netral karena harus terus aktif mengupayakan perdamaian dan meredakan ketegangan dunia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabinet Soekiman ini bubar pada tahun 1952 disebabkan protes rakyat atas kesepakatan Menlu Soebarjo dengan Pemerintah AS untuk mendapatkan bantuan ekonomi AS dalam kerangka kerja <i>U.S. Mutual Security Act</i>.</li> </ul> |
| 1953 – 1957<br>(Era PM Ali Sastroamidjojo) | Membangun hubungan Indonesia yang seimbang di antara kedua kubu | Berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia dalam panggung internasional | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaknaan yang disampaikan PM Ali Sastroamidjojo ialah Indonesia berhubungan secara seimbang antar Blok Barat dan Timur tanpa melunturkan kemerdekaan dan peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia</li> <li>• Munculnya inisiasi GNB diantara beberapa anggota yang memunculkan pelaksanaan KTT Asia Afrika pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung yang melahirkan “Dasa Sila Bandung”</li> </ul>  |
| 1957 – 1959<br>(Era PM Djuanda)            | <i>Bargaining</i> yaitu upaya diplomatik untuk                  | Sebisa mungkin tetap memperjuangkan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tanggal 13 Desember 1957 melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia mendeklarasikan ke dunia Internasioanl</li> </ul>  |

|  |  |                         |   |
|--|--|-------------------------|---|
|  | <p>mendapatkan dukungan dari kedua kubu Perang Dingin untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia</p> | <p>perdamaian dunia</p> | <p>bahwa wilayah Indonesia bersifat <i>archipelagic state</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 1958, AS terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang membuat Indonesia memiliki perspektif negative atas AS dan sekutunya. Sulit bagi Indonesia yang sedang memperjuangkan pembebasan Irian Barat untuk bersikap berimbang kepada kubu AS.</li> <li>• Indonesia akhirnya lebih condong ke Uni Soviet karena AS menolak mengekspor persenjataan ke Indonesia. Sebaliknya Uni Soviet memberikan pinjaman lunak senilai 100 juta dollar kepada Indonesia untuk membeli persenjataan.</li> <li>• Perubahan sikap AS di bawah Presiden John F. Kennedy yang semula mendukung Belanda atas penguasaan Papua Barat menjadi mendukung Indonesia (meskipun dianggap sudah terlalu dekat dengan Uni Soviet dan China) oleh karena posisi AS yang semakin sulit.</li> <li>• 3 (tiga) capaian Indonesia di era ini: modernisasi persenjataan militer, penambahan perairan nusantara, dan pembebasan Papua Barat.</li> </ul> |
|--|--|-------------------------|---|

|                                       |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|--|
| <p>1959 – 1966<br/>(Era Soekarno)</p> | <p>Bebas dari segala bentuk neokolonialisme</p> | <p>Secara aktif memperjuangkan baik secara sendirian – sebagai <i>middle power</i> di Asia Tenggara dan salah satu negarapendiri GNB – maupun di forum internasional (termasuk membentuk blok baru untuk melawan neokolonialisme dalam bentuk CONEFO)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di era Soekarno, kebijakan luar negeri Indonesia lebih condong ke kubu komunis – dan sekaligus menjauh dari kubu Barat. Kecenderungan ini terjadi setelah mengetahui bahwa AS mendukung Gerakan pemberontakan PRRI/Permesta pada tahun 1958 dan sikap Presiden Lindon B. Johnson yang tidak seakrab Presiden J.F Kennedy kepada Indonesia</li> <li>• Soekarno merasa dilecehkan oleh Inggris karena Inggris tidak berkonsultasi pada Indonesia perihal pendirian Negara Federasi Malaysia (pada tanggal 16 September 1963) yang terdiri atas Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Kemudian muncul istilah “Ganyang Malaysia” pada 3 Mei 1964 di sebuah rapat raksasa di Jakarta dalam perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang disampaikan Soekarno.</li> <li>• Indonesia menganggap Malaysia sebagai kekuatan neo-kolonialisme yang didukung Inggris dan harus diimbangi melalui gabungan kekuatan progresif yang dinamakan <i>Conference of the New Emerging Forces</i> (CONEFO). CONEFO pada prinsipnya</li> </ul> |
|---------------------------------------|---|---|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>merupakan suatu blok baru , yang kemudian dikenal dengan istilah Poros Jakarta – Peking – Pyongyang – Hanoi, yang didirikan pada 7 Januari 1965 yang mendapat dukungan dari China.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di tahun 1962, AS di bawah pemerintahan Presiden John F. Kennedy menjadi mitra dekat Indonesia (dibuktikan dengan dukungan Pembebasan Papua Barat dan hibah sepuluh C-130B Hercules). Di sisi lain, Uni Soviet dan China juga masih tetap menjadi mitra dekat Indonesia (dibuktikan dengan penawaran pinjaman lunak dari Uni Soviet untuk membangun stadion olah raga Senayan dan urunan bantuan China untuk membangun Gedung CONEFO)</li> <li>• CONEFO tidak bertahan lama, menyusul meletusnya pemberontakan G30S/PKI yang menimbulkan ribuan korban jiwa yang kemudian menyebabkan konflik sosial besar di tahun 1965 hingga 1966.</li> <li>• Kemudian muncul tuntutan dari berbagai kesatuan aksi yang terkenal dengan sebutan “TRITURA” (Tri Tuntutan Rakyat) – yaitu bubarkan PKI, turunkan harga dan <i>reshuffle</i> kabinet.</li> </ul> |
|--|--|--|---|

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
|                               |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterbitkannya Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 (sebagai hasil dari sidang umum MPRS bulan Juni dan Juli 1966), yang mana salah satu ketetapannya memberikan penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yakni: (1) politik bebas-aktif untuk melawan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya; dan (2) mengabdikan kepada kepentingan nasional dan Amanat Penderitaan Rakyat.</li> </ul>   |
| 1966 – 1998<br>(Era Soeharto) | Tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila (tidak memihak Blok AS maupun Blok Soviet) | Melawan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan aktif dalam Gerakan Non Blok (GNB), PBB dan ASEAN – Namun tidak menjadikan GNB sebagai blok tandingan baru | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketakutan akan bangkitnya komunisme telah membuat Indonesia pada era Soeharto (yang elit politiknya didominasi kelompok militer) lebih condong ke Blok AS – tidak saja hingga Perang Dingin berakhir di tahun 1991, namun juga hingga masa Orde Baru berakhir pada tahun 1998. Indonesia terus menjaga “jarak” dengan China – yang dianggap menjadi ancaman serius bagi keamanan domestic serta perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.</li> <li>• Soeharto lebih mengutamakan politik luar negeri yang lebih sederhana dengan memfokuskan pada kebutuhan Indonesia akan keamanan, stabilitas,</li> </ul> |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | <p>dan pembangunan ekonomi. Politik luar negeri Indonesia lebih didasarkan pada kedekatan geografis, dengan “<i>inner circle</i>” khususnya ASEAN (sebagai “<i>cornerstone</i>” dari politik luar negeri Indonesia. “<i>Second circle</i>” meliputi negara-negara tetangga di Asia Timur. Dan “<i>third circle</i>” meliputi wilayah Asia Pasifik yang lebih luas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selama era ini, Kawasan Asia Pasifik menjadi fokus kepentingan dan prioritas strategis politik luar negeri Indonesia, sementara hubungan dengan negara-negara dan Kawasan di luar Asia Pasifik diseleksi berdasarkan keuntungan ekonomi yang mereka tawarkan kepada Indonesia.</li> </ul> |
| 1998 – 2004<br>(Era Habibie, Gus Dur, dan Megawati) | Tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu atau negara-negara adikuasa | Aktif dalam forum bilateral (kemitraan strategis) dan multilateral (ASEAN, PBB, WTO, ADB, Bank Dunia dan lain-lain) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan yang di ambil oleh pemimpin di era ini lebih dikonsentrasikan pada pemulihan krisis ekonomi dan penanganan krisis nasional yang terjadi pada tahun 1998</li> <li>• Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Bab IV tentang Arah Kebijakan, huruf C angka 2 tentang Hubungan Luar Negeri – yang dirumuskan hal-hal sebagai berikut: (1) menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif; dan (2) dalam melakukan perjanjian dan kerja</li> </ul>  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>sama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di era Gus Dur (1999 – 2001), Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, menyatakan bahwa Indonesia akan mengikuti politik luar negeri “ecumenical” dengan kecenderungan kuat ke arah globalisme. Hal ini didukung Langkah Gus Dur yang seringkali melakukan lawatan ke luar negeri dengan semangat ekumenisme, beliau mengunjungi negara-negara yang tampak asing satu sama lain, misalnya mengunjungi Kuba setelah melakukan kunjungan ke AS. Juga langkah Gus Dur untuk mengimbangi kekuatan AS dan Barat dengan membangun kemitraan strategis dengan Cina dan India, membangun kerjasama dengan negara-negara Pasifik serta menyeimbangkan negara-negara Islam radikal dengan memilih kontak terbuka dengan Israel. Gus Dur juga berupaya untuk menciptakan perubahan-perubahan di negara-negara kunci Asia agar mereka lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan Indonesia.</li> <li>• Kebijakan politik dan hubungan luar</li> </ul> |
|--|--|--|--|



|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
|                          |  |  | <p>negeri pada masa Gus Dur dikenal dengan sebutan <i>Ecumenical Diplomacy</i> yang berarti merangkul semua negara untuk memperluas persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memprioritaskan: (1) pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat Internasional; (2) pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum; dan (3) pemeliharaan keutuhan nasional, persatuan nasional, stabilitas nasional serta mencegah terjadinya disintegrasi bangsa</p>  |
| 2004 – 2014<br>(Era SBY) | Bebas dalam menentukan sikap atas masalah-masalah internasional dan terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia | Aktif dalam forum bilateral dan multilateral | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara umum, kebijakan luar negeri SBY cenderung <i>outward looking</i> dengan mengedepankan <i>soft power</i> dan bercorak <i>high politics</i> serta mencoba meningkatkan pengaruh Indonesia di forum global.</li> <li>• SBY mengusung pandangan dunianya dengan memposisikan Indonesia dalam sistem internasional sebagai negara dengan “<i>a thousand friends and zero enemies</i>” dan “<i>all direction foreign policy</i>”. SBY berupaya meningkatkan hubungan dengan AS dan China, namun juga menunjukkan diplomasi dengan Iran dan Korea Utara. SBY juga mengupayakan hubungan baik dengan negara-negara tetangga, termasuk</li> </ul> |

|                                      |  |                           |   |
|--------------------------------------|--|---------------------------|---|
|                                      |  |                           | <p>Australia, Singapura, dan Malaysia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indonesia di masa SBY tidak hanya memainkan peran sebagai <i>primus inter pares</i> dalam ASEAN, namun juga mulai memainkan peran penting dalam organisasi dunia seperti G20 dan PBB dan mengambil posisi independent dalam persoalan-persoalan penting mulai dari konflik Suriah hingga persoalan perubahan iklim.</li> <li>• SBY mempromosikan gagasan “<i>dynamic equilibrium</i>” untuk menggantikan konsep tradisional “<i>balance power</i>”. Di bawah gagasan ini, negara-negara ASEAN akan bekerja sama satu sama lain untuk membangun mekanisme jaringan hubungan saling menguntungkan yang membawa mereka untuk bekerja dalam keamanan bersama.</li> <li>• Indonesia membentuk <i>Bali Democracy Forum</i> pada tahun 2008, sebuah event tahunan yang mengundang puluhan negara untuk mempromosikan demokrasi di Asia Pasifik melalui dialog inklusif dan saling berbagi pengalaman.</li> </ul> |
| 2014 – 2019<br>(Era Jokowi – periode | Bebas dalam menentukan sikap atas masalah- | Aktif berkontribusi dalam | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara umum, kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih bersifat <i>inward looking</i> yang berfokus pada penguatan</li> </ul>  |

|                 |   |  |  |
|-----------------|---|--|--|
| <p>pertama)</p> | <p>masalah internasional dan terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia</p> | <p>menyelesaikan berbagai permasalahan dunia</p> | <p>sektor domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Poros Maritim Dunia yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 November 2014 di forum <i>East Asian Summit</i> ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar merupakan upaya pembangunan kekuatan dalam visi pemerintahan Jokowi yang meliputi jati diri (identitas), kedaulatan, keamanan, ekonomi maritim, dan diplomasi maritim yang mencakup lingkungan strategis di tingkat regional.</li> <li>• Jokowi menekankan pada diplomasi membumi (<i>bring diplomacy back to earth</i>). Hal ini diimplementasikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memfokuskan pada pelayanan kepada rakyat, misalnya dengan memerintahkan para diplomat untuk mempromosikan produk-produk Indonesia ke luar negeri. Jokowi juga memfokuskan pada bantuan konsular bagi para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Hal-hal tersebut merupakan agenda domestik Jokowi yang dijadikan salah satu fokus politik luar negerinya.</li> <li>• Politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi dapat bersumber dari konsep <i>middle power</i>. Ini meningkatkan diplomasi kekuatan</li> </ul> |
|-----------------|---|--|--|

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  | <p>menengah untuk berperan dalam arena global. Oleh karenanya, Indonesia memainkan peran penting dalam forum dan organisasi multilateral maupun internasional seperti G20, PBB, dan ASEAN. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam hubungan bilateral khususnya di Kawasan Asia Tenggara untuk mempromosikan isu-isu non-tradisional seperti hak asasi manusia dan lingkungan. Indonesia juga memperluas hubungan yang lebih erat dengan kawasan Indo-Pasifik termasuk juga dengan negara di Kawasan Asia Timur dengan mengikuti sejumlah KTT dan forum. Tujuannya adalah untuk mencegah hegemoni kekuatan besar dan mengelola dampaknya.</p> |
| <p>2019 – sekarang/se mester 1 tahun 2022 (Era Jokowi – periode kedua)</p> | <p>Bebas dalam menentukan sikap atas masalah-masalah internasional dan terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia</p> | <p>Aktif berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dunia</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara umum, politik luar negeri era Jokowi di periode kedua ini lebih <i>outward looking</i> dibandingkan dengan periode pertamanya.</li> <li>• Pandemi Covid-19 yang menghantam dunia membuat politik luar negeri Indonesia berfokus pada penanganan pandemi, misalnya dengan diplomasi vaksin ataupun kebijakan <i>travel bubble</i>.</li> <li>• Lawatan Jokowi ke 2 negara yang tengah berkonflik yakni Rusia-Ukraina</li> </ul>   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>menunjukkan sikap Indonesia yang tidak memihak salah satu negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lawatan Jokowi ke negara-negara Asia Timur (China, Jepang, dan Korea Selatan) yang merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi yang membawa misi kepentingan ekonomi Indonesia</li> <li>• Ancaman krisis energi, krisis pangan, perubahan iklim, sampai dengan ancaman krisis ekonomi menjadi <i>concern</i> pemerintahan Jokowi untuk membangun kemitraan di tingkat global untuk meminimalisir dampak krisis tersebut ke dalam negeri.</li> <li>• Pada tahun 2022 ini Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Presidensi G-20. Tema besar Presidensi G-20 Indonesia 2022 yaitu "<i>Recover Together, Recover Stronger</i>". Melalui tema tersebut, Indonesia mengajak seluruh negara di dunia untuk saling bahu-membahu, mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.</li> </ul> |
|--|--|--|--|

Sumber : Diolah dari berbagai sumber oleh peneliti, 2022

Politik luar negeri yang berlandaskan pada prinsip bebas aktif masih tetap dipegang teguh, baik di masa Orde Lama hingga masa Reformasi, meskipun pengejawantahannya mengikuti dinamika yang terjadi dari masa ke masa. Orientasi politik luar negeri Indonesia pun mengalami perubahan seiring dengan perkembangan nasional maupun internasional yang terjadi. Di masa Orde Lama,

orientasi politik luar negeri ditekankan pada aspek globalisme dengan posisi Indonesia sebagai pemimpin bagi negara-negara “*new emerging force*”, sementara di masa Orde Baru, orientasi politik luar negeri difokuskan pada negara-negara di kawasan berdasarkan konsentrasi geopolitis, yakni ASEAN sebagai “*inner circle*”, negara-negara di Asia Timur sebagai “*second circle*”, dan negara-negara di Asia Pasifik sebagai “*third circle*”. Sedangkan di masa reformasi, mengingat kepemimpinan Indonesia mengalami pergantian, maka orientasi politik luar negeri mengalami perubahan. Misalnya di masa Presiden Gus Dur, orientasi politik luar negeri Indonesia dilandasi semangat “ekumenisme” dengan kecenderungan ke arah globalisme. Sementara di masa SBY, orientasi politik luar negeri bersifat internasionalis dengan fokus pada posisi Indonesia dalam sistem internasional sebagai negara dengan “*a thousand friends and zero enemies*” dan “*all directions foreign policy*”. Sedangkan di masa Presiden Jokowi, orientasi politik luar negeri diarahkan pada “diplomasi membumi” atau “diplomasi pro-rakyat” yaitu Indonesia akan memfokuskan pada isu-isu domestik. Di awal pemerintahan Jokowi, politik luar negeri Indonesia diasumsikan akan lebih menekankan pada bilateralism ketimbang multilateralisme. Namun munculnya pandemi Covid-19 sejak akhir 2019 yang kemudian diikuti munculnya berbagai krisis seperti krisis energi, krisis pangan, dan juga ancaman krisis ekonomi, membuat politik luar negeri era Jokowi harus membangun kemitraan-kemitraan dengan banyak negara dalam upayanya untuk mengatasi permasalahan global yang bahkan bisa saja berdampak bagi Indonesia.

Politik luar negeri Indonesia dalam praktik dan teori pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi historisnya yang mengacu pada kepentingan nasional dan tatanan dunia yang terjadi pada masa tersebut. Penggunaan konsep kepentingan nasional disini untuk menjelaskan cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif. Dalam studi hubungan internasional, kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan dan dipertahankan oleh suatu negara. Oleh karena itu, kepentingan nasional merupakan kunci utama dalam politik luar negeri.

Menurut Coulombis dan Wolfe, dalam *Introduction to International Relations*, politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan atau kepentingan nasional yang menggunakan *power* dan *capability*. Dalam hal ini politik luar negeri dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Pemerintah sendiri berpengaruh besar dan turut bertanggungjawab dalam peyelenggaraan politik luar negeri. Kekuatan-kekuatan sosial-politik lainnya sebagai *pressure group* juga turut menentukan arah kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Konsep kepentingan nasional sendiri telah lama menjadi perbincangan pro dan kontra di kalangan akademisi hubungan internasional. Paul Seabury misalnya menjelaskan bahwa kepentingan nasional seringkali dihubungkan dengan sekumpulan dari maksud-maksud tertentu yang oleh suatu negara diusahakan untuk dicapai pelaksanaannya dalam politik luar negeri.

Oleh sebab itu, pengertian kepentingan nasional adalah suatu pengertian yang deskriptif, yaitu bahwa kepentingan nasional dipercaya sebagai tujuan yang mesti dicapai oleh suatu negara melalui peran pemerintah. Definisi demikian berarti usaha untuk memindahkan abstraksi ke dalam fakta-fakta (kenyataan), sehingga rumusan kepentingan nasional dapat sejalan dengan kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Sedangkan pengertian tujuan politik suatu negara adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan itu mencakup deskripsi atas situasi negara di masa mendatang sekaligus sebagai harapan dari pembentukan masa depan yang dicita-citakannya. Dengan demikian, suatu negara sudah sepatutnya merancang suprastruktur (sarana), dengan melakukan berbagai indakan yang memperlihatkan adanya kebutuhan dan keinginan serta tujuan negara tersebut. Perwujudannya pertama kali haruslah mengacu pada penetapan kebijakan politik yang harus mempertimbangkan faktor- faktor internal (domestik) dan faktor eksternal (geopolitik).

Peran kepentingan nasional ini secara nyata disebutkan oleh Peter B. Evans, Harold K. Jacobson, and Robert D. Putnam dalam bukunya *Double-Edged Diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics* (1993) yang menyebutkan bahwa langkah diplomasi dan kebijakan politik luar negeri

seringkali dimaknai sebagai hasil interaksi antara kepentingan dalam negeri & dinamika internasional (*double-edged diplomacy*) atas nama kepentingan nasional.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan suatu alat untuk mencapai kepentingan nasional di kancah internasional. Demikian pula penerapan politik luar negeri Indonesia yang berkarakter bebas aktif, dijalankan oleh setiap pemimpin Indonesia pada masanya untuk melindungi kepentingan nasional.

Dengan prinsip politik yang bebas aktif, Indonesia akan mudah menentukan kebijakan dan sikapnya sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Prinsip bebas aktif dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri Indonesia disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional (Elisabet, 2016). Terlebih lagi, perubahan yang dapat mempengaruhi perkembangan di tingkat Nasional. Dengan begitu, Indonesia berupaya memaksimalkan kontribusi internasional demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat Indonesia maupun dunia. Maka prinsip bebas aktif dilaksanakan secara lebih proaktif, pragmatis, fleksibel, asertif dan juga akomodatif.

## **REFERENSI**

- Ashari, Khasan. (2020). Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Delanova, M. O. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Melalui Penguatan Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Dinamika Global*, 2(02), 154–172. <https://doi.org/10.36859/jdg.v2i02.40>
- Elisabet, Adriana. (2016). Grand Desain Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & LIPI.



- Evans, Peter B; Harold K. Jacobson, and Robert D. Putnam Berkeley. (1993). Double-Edged Diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics. University of California Press.
- Fearon, J. D. (1998). Domestic Politics, Foreign Policy, And Theories Of International Relations. Dalam Annual Review of Political Science.
- Ganjar Widhiyoga; Setyasih Harini. (2019). Identitas Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Reformasi (1999-2014). Research Fair Unisri, 3(1), 568.
- Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia : Perspektif Teori Peran. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, IV(II), 17–27.
- Irewati, Awani & Indriana Kartini. (2019). Potret Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Keohane, R. O. (2020). International Institutions And State Power: Essays In International Relations Theory. In International Institutions And State Power: Essays In International Relations Theory. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429032967>
- Kusno, Malikul. (2014). Bung Hatta dan Politik Bebas Aktif Indonesia. Dalam Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 3 (1) Januari 2014, 12-25.
- Mangadar, S. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 11(1), 67–85. <https://doi.org/doi.org/10.26593/jihi.v11i1.1442.%25p>
- Mila, N., Vida, F., & Adi, D. P. (2020). Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi. Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan), 1(2), 73–100.

- Moravcsik, A. (1997). Taking preferences seriously: A liberal theory of international politics. *International Organization*, 51(4), 513–553. <https://doi.org/10.1162/002081897550447>
- Nainggolan, Poltak Partogi. (2018). *Indonesia dan Rivalitas China, Jepang, dan India*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nye, Joseph S (Jr). (1999). Redefining the National Interest. Dalam *Foreign Affairs*, Vol. 78, No. 4 (Jul. - Aug., 1999), halaman 22-35.
- Mila, Nasihatul, Fatma Vida, dan Depict Pristine Adi. Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi. Dalam *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. I No. 2 November 2020.
- Muzakki, Fadlan. (2017). Theory, Practice, and Analysis of Indonesia's Foreign Policy. Dalam *Jurnal Translitera* Edisi 5/2017.
- Pakpahan, Beginda. (2018). *Indonesia, ASEAN, dan Ketidakpastian Hubungan Internasional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sabir, M. (1987). *Politik Bebas Aktif*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Sukma, Rizal . (1995). The Evolution of Indonesia's Foreign Policy: An Indonesian View. Dalam *Asian Survey*, Vol. 35, No. 3 (Mar., 1995). University of California Press.
- Umar, Harun & Irma Indrayani. (2020). State Political Behavior: (Foreign And Domestic Policy, Diplomacy And Cooperation, International Political Dynamics). Dalam *Journal of Social Political Sciences (JSPS)*, Vol. 1, No. 2, May, 2020.
- Yani, Yanyan Mochamad & Ian Montratama. (2017). *Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo